BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Magang I Taruna/i Program Studi Dipolma III Teknologi Otomotif yang dilaksanakan di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Kabupaten Tuban selama 1 (satu) bulan, kami dapat mengambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Sistem administrasi di UPPKB Widang telah berjalan secara terstruktur dan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku. Administrasi mencakup proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan, hingga pendokumentasian data hasil penimbangan kendaraan. Seluruh laporan harian dan bulanan disusun oleh petugas administrasi dan diserahkan kepada kepala regu atau kepala UPPKB. Selain itu, sistem pendataan kendaraan sudah berbasis teknologi, sehingga proses input dan rekap data lebih efisien dan akurat. Mengetahui dan memahami tentang penimbangan kendaraan bermotor di lapangan. Kebijakan
2. K3 di UPPKB Widang diterapkan melalui berbagai aspek seperti penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), penerapan tata tertib kerja, kebersihan lingkungan kerja, serta kelayakan bangunan dan fasilitas kerja. Petugas dibekali pemahaman mengenai prosedur keselamatan selama operasional berlangsung. Kegiatan kerja terbagi dalam shift yang terjadwal, serta didukung oleh pelatihan dan pembinaan rutin yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan demi menjaga standar keselamatan kerja.
3. UPPKB Widang memiliki struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas antara koordinator, petugas operasional, dan administrasi. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui metode penimbangan statis dan dinamis, dilengkapi dengan SOP yang rinci mulai dari tahap pemeriksaan dokumen, penimbangan, hingga penindakan pelanggaran. Metode kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kendaraan bermotor angkutan barang tidak melebihi daya angkut yang diizinkan demi menjaga keselamatan jalan dan infrastruktur

V.2 Saran

Berdasarkan evaluasi selama magang 1, untuk meningkatkan pelayanan serta kinerja dari UPPKB Widang kami menyarankan:

1. Perlunya penambahan sumber daya manusia tenaga penguji kendaraan bermotor yang berkompeten di lapangan guna agar membantu dalam pengawasan lebih efektif terhadap kendaraan yang tidak layak jalan dan memahami peraturan dan standar yang berlaku, sehingga dapat memastikan kendaraan mematuhi semua persyaratan, termasuk aspek teknis seperti emisi, kondisi rem, dan komponen keselamatan lainnya.
2. Meskipun standar dan prosedur pelayanan telah mengikuti peraturan yang berlaku, UPPKB Widang harus melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi SOP (Standar Operasional Prosedur). Ini termasuk penggunaan teknologi untuk mendukung proses penimbangan dan pemeriksaan dokumen agar lebih cepat dan akurat, serta mengurangi risiko kesalahan manual.
3. Pengelola UPPKB Widang harus memperketat pengawasan penggunaan APD di kalangan pegawai, memastikan setiap petugas selalu mematuhi standar keselamatan. Pelatihan mengenai pentingnya APD dapat ditingkatkan agar pegawai lebih sadar akan risiko yang mereka hadapi. Selain itu, Wasatpel perlu memastikan ketersediaan dan kelayakan APD sesuai standar keselamatan kerja.
4. UPPKB Kabupaten Tuban perlu melengkapi fasilitas keselamatan, termasuk pemasangan rambu-rambu terkait Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), serta jalur evakuasi yang jelas dan mudah diakses dalam keadaan darurat. Pengelola harus mengutamakan keselamatan tidak hanya bagi pegawai, tetapi juga pengguna jasa di UPPKB Widang.
5. Perlunya alat pembaca kartu uji (Smart Card) agar identifikasi STUK (BLU-e) layak sesuai standar yang berlaku. Ini mencegah pemalsuan dokumen fisik seperti STUK konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Menteri 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan. Jakarta 2015
- Dirjen Perhubungan Nomor 736 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan. Jakarta, 2017
- Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor AJ.007/2/17/DRJD/2020 Tahun 2020 mengenai Toleransi Sanksi Kelebihan Muatan Angkutan Barang Pokok Dan Barang Penting
- Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyipanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Jakarta, 2015
- SK.736/AJ.108/DRJD/2017 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor mengatur prosedur pelayanan.
- Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 43 Tahun 1993 tentang Ukuran dan Muatan Kendaraan Bermotor. Jakarta, 1993
- Mentri Perhubungan Nomor 5 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Penimbangan.Kendaraan Bermotor di Jalan. Jakarta, 1995
- Peraturan Menteri PerhubunganDarat Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Jakarta, 2021
- Undang – undang No.1 tahun 1970 tetang keselamatan kerja. Jakarta, 1970
- Permenakertrans No.Per.03/MEN/1982 Pasal 2 butir I
- Permenakertrans No.Per.01/MEN/1981 pasal 4 ayat (3)